

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pada era reformasi pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rangkaian pemerintah agar dapat mewujudkan *good governance* dan *clean governance*. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan serta kinerja pemerintah, agar supaya laporan keuangan dan kinerja pemerintah yang dimaksud dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam organisasi yang mengelola dana masyarakat, pemerintah harus mampu memberikan pertanggung jawaban pada masyarakat melalui laporan keuangannya. Semakin baik pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan maka akuntabilitas laporan keuangan pemerintah akan meningkat. Untuk meningkatkan akuntabilitas publik, pemerintah perlu mengakses laporan keuangan yang dibuatnya agar masyarakat dengan mudah memperoleh laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah cerminan untuk mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah di haruskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan unsur-unsur yang mempengaruhi kualitasnya laporan keuangan di suatu instansi/pemerintah terdapat laporan keuangan yang relevan dan andal pada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di daerah masing-masing pada kabupaten atau kota.

Laporan keuangan merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas suatu entitas serta media informasi akuntansi untuk bisa menyampaikan hasil kinerja pengelolaan keuangan kepada pihak lain. Menurut PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah : “Informasi dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas jika informasi tersebut memenuhi kriteria dalam akuntansi pemerintahan yaitu relevan (relevance), andal (reability), dapat dipahami (understandability) dan dapat di bandingkan (comparability)”. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu pedoman dari sistem akuntansi pemerintah daerah. Adanya peraturan tersebut tidak serta merta terbebas dari kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja yang ditemukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat.

PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mengatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintah. Sistem akuntansi yang dirancang dan dijalankan dengan baik akan menjamin dilakukannya prinsip *stewardship* dan *accountability* dengan baik pula. Pemerintah atau unit kerja pemerintah perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak saja berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi tersebut hendaknya mendukung pencapaian tujuan organisasi

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem informasi yang membantu proses pencatatan dan pelaporan anggaran dan keuangan daerah, yang merupakan salah satu subsistem organisasi yang memfasilitasi kontrol dengan melaporkan kinerja pemerintah

daerah (Ifa Ratifah, Moch. Ridwan, 2012). Sistem akuntansi keuangan daerah sebagai suatu pedoman yang diterapkan dalam proses kegiatan keuangan di pemerintahan diharapkan mampu untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Akuntansi keuangan daerah memegang peranan penting pengelolaan keuangan daerah agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selama ini pelaporan keuangan pemerintah, baik di pusat maupun daerah terkesan belum memenuhi kebutuhan informasi pemakainya. Kurangnya informasi menyebabkan pemerintah tidak mempunyai manajerial yang baik. Berdasarkan hasil audit temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2016 memberikan pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini dikarenakan oleh lemahnya pengendalian intern, dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan, yaitu antara lain : Belum tersediannya tenaga akuntansi yang telah memiliki kompetensi dalam penyajian dan penyusunan Laporan Keuangan, pejabat pengelola keuangan SKPD belum maksimal dalam memahami tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga terjadi saling lempar tanggung jawab antara sesama pejabat pengelola keuangan SKPD. Masih rendahnya kualitas penyusunan laporan keuangan dan administrasi pengelolaan aset dimasing-masing SKPD. Kompetensi sumber daya manusia juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan kompetensi sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang

keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi yang baik.

Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu yang bisa mempengaruhi kualitas laporan keuangan ialah sistem pengendalian internalnya. Dalam PP 60 tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) peraturan ini mengadopsi model Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Menurut COSO sistem pengendalian merupakan proses kegiatan yang dilakukan didalam entitas (organisasi, termasuk perusahaan), dipengaruhi oleh dewan komisaris (atau dewan pengawas serupa), manajemen, dan personel lainnya, dirancang untuk memberikan jaminan yang layak agar entitas mencapai tujuan-tujuannya. Kerangka SPIP dalam PP 60/2008 antara lain: Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Walaupun banyak provinsi atau kota/kabupaten yang memiliki kualitas laporan keuangan baik dan mendapat opini WTP tetapi belum tentu memiliki pengendalian internal yang baik, bahwa WTP tidak menjamin tidak ada korupsi di lembaga yang memperoleh opini demikian. WTP menjadi obsesi pimpinan lembaga, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sampai melayangkan kritik, WTP seolah menjadi ajang pameran pimpinan lembaga pusat dan daerah. Bahkan ada kepala daerah yang memerintahkan anak buahnya menyuap auditor BPK agar hasil pemeriksaan beropini WTP.

Pengendalian intern dalam suatu organisasi perusahaan, lembaga organisasi profit maupun nonprofit mutlak menjadi hal yang utama dan sangat dibutuhkan karena kegiatan operasional dan kinerja memerlukan suatu kebijakan khusus yang mampu mengakomodasi dan memberikan batasan serta ketentuan khusus dalam setiap pelaksanaan kegiatannya. Pengendalian intern dibutuhkan agar mudah dalam menemukan atau menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada atau permasalahan yang mungkin akan timbul dalam proses pencapaian tujuan sehingga pencapaian tujuan bisa kita ketahui secara jelas. Dalam meningkatkan kinerja pemerintah senantiasa menghadapi masalah yang kompleks,

permasalahan yang paling umum terjadi ialah korupsi, kesalahan administrasi serta pengelolaan keuangan yang tidak berjalan dengan baik. Kualitas laporan keuangan dapat diperkuat juga dari opini BPK.

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Wati,dkk (2016) dari hasil penelitian ini bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan keuangan dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan lalu adanya perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah yaitu pengambilan sample pada penelitian ini bertempat di Bandung Bussines School, tahun 2016.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tawaqal, dkk (2017) menyatakan bahwa pengaruh penerapan dalam Sistem Pengendalian Intern sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Perbedaan ini pada penelitian sebelumnya adalah terletak pada Sistem Informasi Akuntansi yang berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dikarenakan perbedaan dari satu variable independen Sistem Informasi Akuntansi dan penelitian ini bertempat di Kota Banda Aceh. Penelitian lain yang di lakukan oleh Lina, dkk (2017) peneliti ini menyatakan bahwa Pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan adanya perbedaan penelitian ini pada penelitian sebelumnya adalah bahwa adanya perbedaan variable independen Sistem Pengendalian Intern yang tidak di gunakan dalam judul penelitian tersebut dan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Demak dan memakai Studi Kasus serta mempuntai dua variable independen dan satu variable dependen.

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Ginta, dkk (2017) mereka menyatakan bahwa Pengaruh Sistem pengendalian Intern sangat berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan daerah sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini melakukan penelitian pada Universitas Sam Ratulangi di Kota Manado. Dan Penelitian terdahulu selanjutnya adalah Oktavia&rRahayu (2019) menyatakan bahwa Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Lalu adanya perbedaan penelitian ini adalah terhadap pada Komite Organisasi yang sangat tidak berpengaruh dan berpengaruh negative pada variable independen penelitian saat ini dan tidak berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan.

Penelitian terakhir yang diteliti oleh Vera,dkk (2017) menyatakan bahwa pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi keuangan daerah sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada waktu dan tempat pelaksanaan pembuatan jurnal penelitian akuntansi yaitu dilakukan di Politeknik Negeri Sriwijaya dan bertempat di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

Kualitas terbaik dari laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Di dalam mencapai opini WTP, peran dari sumber daya manusia yang kompeten sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Selain itu, proses penyusunan laporan keuangan harus dilakukan secara efektif dan efisien, tepat waktu, cepat, dan tentunya data yang dihasilkan harus akurat, maka di dalam hal ini diperlukan adanya dukungan sistem akuntansi dan teknologi. Berdasarkan uraian tersebut yang telah diuraikan pada latar belakang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Determinasi Variabel Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang** “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Palembang?
2. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kota Palembang?
3. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kota Palembang?
4. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kota Palembang?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, peneliti hanya membatasi pembahasannya yaitu variabel yang diangkat meliputi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber daya manusia dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten dan Kota Palembang pada Tahap pengumpulan data secara Kuantitatif atau Kuisisioner

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kota Palembang
2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kota Palembang

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada kota Palembang
4. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kota Palembang

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dari berbagai hal yang telah diungkapkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada Sistem Akuntansi Keuangan Daerah , Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Palembang
 - b. Sebagai referensi bagi mahasiswa program studi akuntansi sektor public Politeknik Negeri Sriwijaya khususnya bagi peneliti berikutnya secara umum terkait dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah , Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Palembang.